

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Depo Light Rail Transit (Lrt) Jabodebek Di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Provinsi Jawa Barat) = Land Acquisition For Development For Public Benefit (Case Study: Implementation Of Jabodebek Light Rail Transit (Lrt) Depot Development In Jatimulya Exit, South Tambun District, West Java Province)

Rizka Naufalian Zahra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920557194&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini berfokus pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan depo LRT Jabodebek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perkeretaapian. Berlokasi di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Provinsi Jawa Barat. Fokus tersebut dipilih karena pembangunan depo LRT Jabodebek di bangun di atas tanah seluas 12,22 hektar yang mana tanah tersebut terdapat tanah masyarakat dan tanah pemerintah. Oleh karena itu muncul persoalan mengenai ganti kerugian yaitu persoalan mengenai ganti kerugian di tanah milik masyarakat. Selain itu mengenai ganti kerugian di tanah milik pemerintah, yaitu adanya persengketaan kepemilikan bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga keterlibatan notaris dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk depo LRT Jabodebek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dikuatkan oleh data yang didapat dari observasi dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu terkait dengan proses ganti kerugian yang diberikan belum sesuai dengan asas keadilan. Dalam konteks ganti kerugian karena persengketaan kepemilikan bangunan, notaris memiliki peran dalam membuat akta perdamaian yang digunakan sebagai syarat untuk pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri setempat (konsinyasi).

.....This thesis focuses on the implementation of land acquisition for the public benefit, namely the construction of jabodebek LRT Depot organized by the Ministry of Transportation Directorate General of Railways. Located in Jatimulya Village, South Tambun District, West Java Province. This is important to research because the construction of jabodebek LRT depot is built on an area of 12.22 hectares where the land is on community land and government land. Discussing the compensation on land owned by the community, namely on the amount of value they get. In addition, about compensation on government-owned land, namely the dispute over ownership of buildings. The issues raised in this study relate to regulations on the implementation of land acquisition for the public benefit according to the provisions of the law in Indonesia. In addition, notary involvement in resolving obstacles occurred in the acquisition of land for development for the Jabodebek LRT Depot. The research method used is normative juridical using the statutory approach and the case approach. Legal materials obtained through document studies are

corroborated by data obtained from observations and interviews, analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that there were still some that were not in accordance with Presidential Regulation No. 71 of 2012 concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest, which is related to the compensation process that is not in accordance with the principle of justice. In the context of indemnification due to disputes over ownership of buildings, Notary has a role in making a peace deed used as a condition for taking compensation that is deposited in the local District Court (consignment).